

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 012/OT.05/K.LA/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan indeks nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
- 8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

KESATU

- : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

KEDUA

- : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA

- : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi :
 - 1. Merumuskan tindak lanjut pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;

2. Melakukan kerjasama dengan Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi lainnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT

- : Tim Pelaksana Kerja memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun program dan *timeline* pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah Tim Kerja tentang Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Reformasi Birokrasi.

KELIMA

- : Susunan Keanggotaan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM

- : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

KETUA,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, MH	Ketua	Pengarah
2.	Iskardo P. Panggar, S.H, MH	Anggota	Pengarah
3.	Adek Asy'ari, S.IP.	Anggota	Pengarah
4.	Hermansyah, SH.I., MH.	Anggota	Pengarah
5.	Tamri, S.Hut.,MH.	Anggota	Pengarah
6.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
7.	Muhammad Teguh, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
B. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Widodo Wuryanto, S.PI.,M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
C. TIM PELAKSANA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Mimi Abriyani, S.E.,M.E	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
2.	Fanji Ampra Mahesa Putra, A.Md.	Staf	Anggota
3.	Febrianto Endi Pratama, SE.	Staf	Anggota
4.	Hendi Pratama, A.Md.	Staf	Anggota
5.	Aldila Yugha Andranik, S.E	Staf	Anggota
6.	Anindhyta Sekar Wangi, SE	Staf	Anggota
7.	Sri Winarni, S.E.	Staf	Anggota
8.	Qimu Sholeh,S.E	Staf	Anggota
9.	Alfarobbi Fajrin Thohari, A.Md.	Staf	Anggota
10.	Okgi Fernanda, A.Md.	Staf	Anggota
D. TIM PELAKSANA MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Theresa Agustina P.A, S.Psi, MM	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa Ahli Muda	Koordinator
2.	Andi Trisandi, A.Md	Staf	Anggota
3.	Adelina Puteri Yudha, A.Md	Staf	Anggota
4.	Febby Widya Ningsih, S.Psi	Staf	Anggota
5.	Annisa Munfaati, SE	Staf	Anggota
6.	Fajaria Rahayu, S.Pd	Staf	Anggota
7.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Staf	Anggota
8.	Galih Radityo Utomo, S.Ds.	Staf	Anggota
E. TIM PELAKSANA PENATAAN TATALAKSANA DAN DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Indra Darmawan, S.IP, MM	Kabag Hukum, Humas & Datin	Koordinator

2.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP. MH	Kabag PPPS	Anggota
3.	Sri Rahmawati Nasution, S.Kom,	Staf	Anggota
4.	Uhibbudin Al Haqq, S.Kom.I	Staf	Anggota
5.	M. Lutfi Khakim, SH	Staf	Anggota
6.	Eviyatun Ruaida, S.H	Staf	Anggota
7.	Haris Suganda, S.H	Staf	Anggota
8.	Theresia Valentina Silaban, SH	Staf	Anggota
9.	Fadli Khoms, S.HI	Staf	Anggota
10.	Satria Arif Gumelar, S.P	Staf	Anggota
11.	Amelia S.H	Staf	Anggota
12.	Dwi Zaen Prasetyo, SH	Staf	Anggota
13.	Hamid Badrul Munir, S.HI	Staf	Anggota
14.	Yanuar Rizal, S.Pd.I, M.Pd	Staf	Anggota
15.	Dirga Santosa, SH	Staf	Anggota

F. TIM PELAKSANA PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Raja Monang Silalahi, S.Sos., M.M	Kepala Bagian Pengawasan	Koordinator
2.	Puput Putri Sari, S.Si	Analisis Kebijakan	Anggota
3.	Amri Fahada Syehrun, S.IP	Staf	Anggota
4.	Claudia Rebitta Destasesa, S.I.A	Staf	Anggota
5.	Tyas Woroasih, SH	Staf	Anggota
6.	Oddy Marsa JP, SH	Staf	Anggota
7.	Desti Aryani, S.Pd	Staf	Anggota
8.	Amelia Puspitasari, S.H.	Staf	Anggota
9.	Ricky Ardian, M.IP.	Staf	Anggota



FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H